



## Struktur Konten Pendidikan Politik dalam Buku Murid Pendidikan Pancasila Tingkat Sekolah Menengah Atas

Ismail\*, Nasiwan Nasiwan

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: ismailblues44@gmail.com\*

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata kunci:</b> Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan, Politik	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur konten pendidikan politik dalam buku murid Pendidikan Pancasila pada tingkat sekolah menengah atas. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun van Dijk dengan mengacu pada struktur teks dalam buku murid Pendidikan Pancasila. Hasil Penelitian menunjukkan struktur konten pendidikan politik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada tingkat sekolah menengah atas berdasarkan pada struktur teks dengan menganalisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro bahwa materi pendidikan politik dalam buku murid Pendidikan Pancasila dominan pada penekanan ideologi Pancasila, kajian pendidikan politik dalam buku murid Pendidikan Pancasila tidak berimbang, dan penjelasan dalam wacana pendidikan politik yang diuraikan dalam buku murid Pendidikan Pancasila menggunakan pendekatan kesetiaan dan ancaman dalam menyampaikan pesan. Dengan hasil tersebut maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pendidikan politik yang ditampilkan dalam buku murid Pendidikan Pancasila bersifat indoktrinatif dan kurangnya substansi kajian materi pendidikan politik dalam buku murid Pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi sosial.
<b>Keywords:</b> Education, Pancasila, Politic.	<b>ABSTRACT</b> <i>This research aims to analyze the structure of political education content in the Pancasila Education student textbook at the senior high school level. The method used is critical discourse analysis developed by Teun van Dijk, focusing on the text structure within the Pancasila Education student textbook. The findings reveal that the structure of political education content in the Pancasila Education subject at the senior high school level, based on the analysis of macrostructure, superstructure, and microstructure, shows that the political education material in the textbook predominantly emphasizes the Pancasila ideology. The political education content in the textbook is unbalanced, and the discourse on political education presented in the textbook uses an approach based on loyalty and threats to convey its messages. From these findings, it can be concluded that the political education portrayed in the Pancasila Education student textbook is indoctrinative, with a lack of substance in the political education material relevant to current social conditions.</i>

### PENDAHULUAN

Pentingnya pendidikan politik bagi warga masyarakat khususnya pada kaum muda di zaman teknologi sekarang ini adalah untuk mencegah terjadinya disinformasi. Perkembangan teknologi seperti sekarang ini membuat maraknya aplikasi media sosial yang dijadikan sebagai strategi politik untuk mendapat dukungan di masyarakat (Sujastika et al., 2024). Para politisi seolah memahami bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang enggan dan apatis terhadap isu politik sehingga, mereka menegemas isu-isu politik itu menjadi suatu yang menyenangkan. Hal ini membuat anak muda yang tidak sadar dan tidak melek politik bisa mengakses informasi dari

sumber yang tidak relevan, hanya peduli pada gimik serta memilih pemimpin tidak berdasarkan pada pertimbangan visi, misi dan program kerja (Shadiqi et al., 2022). Apatisme politik seperti ini tentu bisa berdampak buruk bagi proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk itu penyadaran politik anak muda melalui pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan perlu ditingkatkan utamanya dari segi konten, isi, dan muatannya.

Politik telah menjadi salah satu dimensi dalam kajian pendidikan kewarganegaraan khususnya di tingkat sekolah menengah atas di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat kita lihat adanya upaya pendidikan politik dalam mata pelajaran PPKn sebelumnya, namun muatannya tidak begitu dapat mendorong partisipasi warga negara dalam dunia politik (Patriansyah et al., 2024).

Sampai saat ini kegagalan pendidikan Politik dalam PPKn belum mampu diselesaikan secara konstruktif. Kegagalan ini terjadi pada beberapa faktor akibat dari hegemoni dan kooptasi rezim pemerintah melalui kurikulum dan indoktrinasi cakupan muatan isi dalam buku pelajaran, sehingga disparitas dalam pelaksanaan kurikulum dan kompleksitas materi semakin menghambat pengembangan kesadaran politik di kalangan peserta didik (Lestari et al., 2024). Kegagalan pendidikan politik pada PPKn juga dapat dilihat pada rendahnya daya tarik peserta didik pada PPKn, ketidakjelasan substansi dan materi PPKn, citra doktrinasi pembelajaran PPKn, rentan terhadap intervensi kekuasaan, tidak bisa membangun rasa bangga terhadap nasionalisme, secara keilmuan masih dipertanyakan payung keilmuannya, dan PPKn mewarisi dosa-dosa rezim yang pernah berkuasa (Nasiwan, 2023).

Pada saat ini, di sekolah berlaku kurikulum merdeka yang mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Pancasila sesuai Pasal 40 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjelasan dari pasal tersebut mengatakan bahwa Pendidikan Pancasila yang dimaksud adalah yang memuat di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan. Meski demikian, hal tersebut menimbulkan perdebatan terkait muatan dan tujuan antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dihindari yang kemudian memunculkan masalah tersendiri dari sisi akademis karena dianggap muatan Pendidikan Pancasila berfokus pada menanamkan nilai-nilai moral dan etika, sementara Pendidikan Kewarganegaraan membahas tanggung jawab kewarganegaraan, oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila yang berlaku saat ini perlu kejelasan dalam tujuannya (Puspita et al., 2024).

Pancasila merupakan lima sila dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (Himawan & Wilujeng, 2020). Pendidikan Pancasila dijadikan sebagai pendidikan karakter bangsa untuk pembentukan karakter dimulai dari pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan baik jika penguatan penanaman nilai-nilai Pancasila terus dilakukan baik di lingkungan keluarga maupun dunia pendidikan atau bahkan sosialisasi-sosialisasi pengenalan yang dapat dilakukan agar generasi milenial tidak kehilangan arah, justru dapat semakin memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri (Pattiruhu, 2022).

Berdasarkan kajian sejarahnya, setelah lengsernya presiden pertama Indonesia Soekarno dan diganti oleh Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagai satu-satunya ideologi negara di Indonesia. Bahkan sampai sekarang ini Pancasila merupakan sumber kekuatan dalam

menyatukan nasionalisme Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer (Purdey et al., 2020). Hal ini bisa dilihat pada pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh presiden Jokowi melalui dengan dalih karena tidak sesuai dengan Pancasila (Howe, 2022). Pada periode presiden Soeharto bertepatan dengan tahun-tahun indoktrinasi massa Pancasila yang sistematis yang paling jelas terlihat dalam program-program seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau dalam bahasa populer P4 (kursus tentang Pedoman Pembinaan dan Penerapan Pancasila), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) (Curaming, 2020). Bahkan sebuah badan yang dikenal sebagai BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) didirikan untuk mengawasi praktik dan penerapan Pancasila (P4) (Suryadinata, 2018).

Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi resmi dan mewajibkan agar diajarkan disetiap sekolah-sekolah (Schneier, 2016). Ketika Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1998, sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan dalam mengembangkan materi baru untuk mengajarkan sikap dan nilai-nilai demokrasi. Ideologi nasional Pancasila tetap ditekankan pada kurikulum baru dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan demokratis. Meskipun perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan selama era Reformasi awal cenderung mengurangi penekanan Pancasila, kurikulum ini tetap bertahan dan bahkan telah dihidupkan kembali sebagai salah satu komponen kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berlaku saat ini (Hefner & Bagir, 2021). Tetapi pandangan berbeda oleh (Sutopo et al., 2020) bahwa sejak era reformasi, dalam dunia pendidikan, Pancasila kurang dimanfaatkan sebagai inspirasi dalam membentuk karakter peserta didik, kurang dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta kurang dimanfaatkan sebagai pedoman perilaku peserta didik. Akibatnya, nilai-nilai budaya dan etika Pancasila tidak berkembang di lembaga pendidikan dan bahkan hilang.

Sementara itu pendidikan politik adalah pembentukan atau pendidikan diri sendiri, karena menyangkut aktivitas individu untuk membentuk diri sendiri, secara sengaja yang terus menerus berproses dalam diri seseorang agar yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan kondisi lingkungan sekitarnya (Handam & Tahir, 2020). Kemudian (Clark, 2016) mengungkapkan bahwa pendidikan politik bagi setiap individu tidak hanya berkaitan dengan memperoleh pengetahuan politik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan umum secara aktif, tetapi diperlukan pula untuk belajar, menghargai dan memiliki prinsip, norma, nilai, sikap, dan kebiasaan tertentu.

Menarik untuk dicermati bahwa pendidikan politik di seluruh negara berdasarkan perspektif historis hampir semua negara di dunia menghubungkan dengan ideologinya secara substantif dengan perspektif yang berbeda-beda (Zhang, 2024). Hal tersebut penting dan harus berkisar pada identifikasi konten inti, di mana mata pelajaran ideologi dan politik diupayakan bersinggungan dengan pendidikan integritas (Wang & Tian, 2023). Pendidikan ideologi dan politik dalam kurikulum merupakan titik awal yang penting bagi negara kita untuk menerapkan moralitas dan membina manusia di era baru (Gong et al., 2023). Dengan mengintegrasikan pendidikan ideologi dan politik, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan politik (Dandan et al., 2023).

Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan politik di sekolah khususnya tingkat sekolah menengah atas di Indonesia tentu memiliki relevansi yang jelas dengan menyentuh kehidupan

ekonomi, politik, dan budaya. Pembelajaran politik mengacu pada proses mental seperti motivasi, nilai, dan norma suatu budaya. Proses ini berlangsung dengan cara memasukkan anak-anak ke dalam budaya politik dan mengubahnya menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang mampu menilai dan menjalankan hak-hak yang relevan dengan budaya tersebut. Keduanya berjalan bersama dalam masyarakat yang terbuka dan kemudian menuntut tindakan politik yang aktif (Supriyadi et al., 2020).

Analisis konten Pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila pada tingkat sekolah menengah atas perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang menganggap bahwa Pendidikan Pancasila hanya memuat pendidikan nilai dan budaya, sedangkan pendidikan politik dan demokrasi tidak termuat didalamnya sehingga kurang mampu memberikan pengetahuan politik kepada peserta didik. Analisis konten muatan pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila pada tingkat sekolah menengah atas bertujuan untuk mencari jawaban atas formulasi dan konten kurikulum yang diterapkan pemerintah dalam mempersiapkan peserta didik yang sadar dan melek terhadap politik. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengkajian muatan materi pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila. Sebab sejauh ini belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji muatan pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila di sekolah juga merupakan pelajaran baru dampak dari penggantian kurikulum sebelumnya.

Secara konseptual, pendidikan politik bukan hanya mengenai transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan diri individu melalui pemahaman terhadap lingkungan sosial dan politik (Handam & Tahir, 2020). Clark (2016) menegaskan bahwa pendidikan politik harus mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta internalisasi nilai dan norma yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Di banyak negara, pendidikan politik juga dikaitkan dengan penguatan ideologi nasional dan integritas (Zhang, 2024; Wang & Tian, 2023). Integrasi pendidikan ideologi dan politik dalam kurikulum dianggap penting untuk membentuk manusia yang berkarakter dan memahami konteks sosial-politik (Gong et al., 2023; Dandan et al., 2023).

Namun, hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif struktur konten pendidikan politik dalam buku teks Pendidikan Pancasila di tingkat sekolah menengah atas, terutama setelah perubahan kurikulum. Studi-studi terdahulu lebih banyak membahas kegagalan pendidikan politik dalam PPKn (Nasiwan, 2023; Lestari et al., 2024), atau integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran (Sutopo et al., 2020; Himawan & Wilujeng, 2020), tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana muatan politik disusun dan disampaikan dalam buku teks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur konten pendidikan politik dalam buku murid Pendidikan Pancasila tingkat SMA dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengkaji muatan pendidikan politik dalam konteks kurikulum baru serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan materi yang lebih seimbang, kontekstual, dan partisipatif.

## METODE

Penelitian ini merupakan analisis konten menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Metode analisis wacana kritis ialah metode yang berfokus kepada penguraian wacana yang tertuang dalam suatu teks untuk tujuan

mengetahui makna serta nilai yang terkandung didalamnya secara logis (Vandijk, 2015). Sumber utama yang menjadi objek penelitian ini adalah Buku Murid Pendidikan Pancasila Tingkat SMA/MA/SMK/MAK Kelas 10, 11, dan 12 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 khususnya pada objek yang menjadi kajian pendidikan politik yaitu sistem politik, demokrasi, dan kebijakan politik. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan penjelasan tiga objek materi kajian dan dianalisis berdasarkan struktur teks yaitu struktur makro (menentukan terkait tema yang diangkat), superstruktur (rentetan pendahuluan, isi, dan penutup), dan struktur mikro (menentukan makna berdasarkan superstruktur).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Teks Pendidikan Politik dalam Buku Murid Pendidikan Pancasila pada Kajian Sistem Politik**

Topik: Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai sistem berkehidupan Indonesia baik itu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Pendahuluan: Menguraikan tentang arti dari ideologi secara ilmu kebahasaan dan secara umum

Isi: Menguraikan pentingnya Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun yang dapat menuntun Indonesia dalam mencapai tujuannya, baik itu di bidang politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan- keamanan negara, termasuk pula politik luar negeri.

Penutup: Penekanan kembali bahwa Pancasila merupakan seperangkat pemikiran yang telah terealisasi sebagai pengalaman bangsa Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Makna: Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan negara, termasuk pula politik luar negeri. Hal tersebutlah yang mendasari istilah pancasila sebagai ideologi negara Indonesia (halaman 37 buku kelas 10).

Topik: Produk hukum dan hierarki hukum, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di Indonesia, serta hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan

Pendahuluan: Mendeskripsikan pembahasan terkait dengan macam-macam bentuk hukum dan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan kedudukannya.

Isi: Menguraikan tentang produk peraturan perundang-undangan yang di buat oleh lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia. Kemudian menjelaskan hierarki atau tingkatan kedudukan dari peraturan-perundang-undangan tersebut dan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip hukum, serta muatan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Salin itu, menjelaskan juga terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi dari setiap peraturan perundang-undangan dan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.

Penutup: Penekanan Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum serta pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan muatan isi dan kedudukannya dalam tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan.

Makna: Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang. Ditekankan juga bahwa prinsip-prinsip penegakan hukum di Indonesia yaitu harus harmonis dan sinkron dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan hierarki tingkatannya. Penekanan yang paling utama yaitu hubungan pancasila dengan peraturan perundang-

undangan. Sebagai sumber dari segala sumber hukum seperti yang digambarkan pada halaman 113. Dan sebagai ideologi negara, maka setiap produk peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasarkan pada Pancasila (halaman 100-119 buku kelas 10).

Topik: Pancasila Sebagai Ideologi negara yang mampu mengantarkan Indonesia menuju cita-cita dan tujuan negara.

Pendahuluan: Mendeskripsikan pengertian secara umum dari ideologi, unsur-unsur yang termuat dalam ideologi menurut Koento Wibisono, dan ciri-ciri ideologi.

Isi: Menguraikan pentingnya ideologi dalam suatu negara untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan negara serta sebagai alat untuk mencapai tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian menguraikan terkait dengan visi pembenagunan Indonesia kedepan yaitu di tahun 2045 dan 2085 sebagai aktualisasi Ideologi Pancasila.

Penutup: Bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai pemersatu keragaman (meja statis) serta tuntunan arah mencapai tujuan negara (leitstar dinamis atau bintang penuntun).

Makna: Penekanan Pancasila sebagai ideologi yang telah memenuhi unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai ideologi dalam suatu negara yang harus dijadikan arah tujuan pembuatan kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Utamanya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Impian 2085 (halaman 23-28 buku kelas 11).

Topik: Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan serta Sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan.

Pendahuluan: Mendeskripsikan pentingnya penentuan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan untuk berjalannya dan keberlanjutan suatu negara

Isi: Menguraikan tentang pengertian dan konsep bentuk negara di dunia yaitu negara kesatuan dengan mengambil konteks Indonesia dan negara serikat. Dan bentuk negara berdasarkan pemilihan pemimpinnya yaitu oligarki, monarki, dan demokrasi. Kemudian menguraikan pengertian dan konsep bentuk pemerintahan yaitu republik dan monarki. Kemudian menguraikan pengertian dan konsep sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer yang dikaitkan dengan konteks sejarah Indonesia.

Penutup: Bahwa bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dalam suatu negara penting dalam mewujudkan keberlangsungan negara. Pentingnya juga ditekankan dalam bagian ini terkait dengan partisipasi dan sikap warga negara dalam mendukung bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

Makna: Penekanan terhadap warga negara untuk aktif berperan dalam mendukung bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dalam konteks negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepedulian terhadap negara untuk mendukung, melalui kritik yang membangun dan menjadi warga negara yang bisa menciptakan perubahan yang lebih baik (halaman 135-156 buku kelas 11).

Topik: Memahami lembaga negara sebagai sistem pemerintahan, kedudukan, dan fungsinya serta peran lembaga negara dalam berbagai bidang.

Pendahuluan: Mendeskripsikan kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan mendeskripsikan terkait hubungan antar lembaga negara di Indonesia dengan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan agar terciptanya check and balance dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Lembaga negara Indonesia terdiri dari suprastruktur yang terdiri dari Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan infrastruktur politik diantaranya partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa.

Isi: Menguraikan pengertian dari lembaga negara secara umum dan secara khusus pada konteks Indonesia yaitu sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan

merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Cirinya diantaranya struktur organisasi yang jelas, menjalankan fungsi sesuai bidangnya, memiliki dasar konstitusi, dan berada di pusat Ibu Kota. Selanjutnya menguraikan kedudukan lembaga negara sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa lembaga negara di Indonesia memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan pembagian kekuasaan pemerintahan dengan menunjukkan gambar struktur lembaga negara berdasarkan UUD NRI 1945. Selanjutnya menguraikan tiga jenis lembaga negara berdasarkan fungsinya yaitu berfungsi langsung atau bertindak untuk dan atas negara, menjalankan fungsi administratif, dan fungsi penunjang alat kelengkapan negara. Selanjutnya menguraikan peran setiap lembaga negara dalam membantu pemerintah mewujudkan tujuan dan pembangunan negara sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang seperti Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Penutup: Menganalisa terkait dengan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alasan bahwa beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa terlalu berat, serta beban Pulau Jawa makin berat dengan jumlah penduduk 54% dari total jumlah penduduk Indonesia. Apakah langkah tersebut tepat?

Makna: Penekanan pentingnya pemahaman terkait dengan lembaga negara negara di Indonesia sehingga dapat mengetahui kedudukan, fungsi, dan perannya dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal tersebut dapat membantu masyarakat memiliki kemampuan dalam hal menganalisis kesesuaian fungsi dan peran masing-masing lembaga negara dengan amanat peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila (halaman 166-184 buku kelas 12).

### **Struktur Teks Pendidikan Politik dalam Buku Murid Pendidikan Pancasila pada Kajian Demokrasi**

Topik: Sejarah penerapan demokrasi Pancasila pada setiap periode pemberlakuan konstitusi di Indonesia.

Pendahuluan: Mendeskripsikan musyawarah sebagai bentuk demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Isi: Menguraikan terkait prinsip utama demokrasi Indonesia yaitu sesuai dengan sila ke empat yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang lebih mengutamakan konsensus dari pada oposisi. Kemudian menguraikan sejarah pemberlakuan demokrasi Pancasila dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku sejak Indonesia merdeka yaitu UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949), UUD RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959), UUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999),

Penutup: Bahwa pentingnya kontrol pemerintah sangat penting dalam keberlangsungan negara agar tidak mengakibatkan adanya kekuasaan tanpa batas dan perilaku sewenang-wenang dari seseorang atau kelompok tertentu.

Makna: Penekanan terhadap pentingnya demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan bagi negara Indonesia melalui sejarah konstitusi yang berlaku. Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah berkembang di masyarakat yaitu musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakannya. Ditekankan juga pentingnya pemerintah kontrol pemerintah dalam negara Indonesia (halaman 33-45 buku kelas 11).

Topik: Perilaku dan sikap demokrasi yang perlu ditunjukkan sesuai dengan UUD NRI 1945 di era keterbukaan informasi

Pendahuluan: Mendeskripsikan perilaku demokratis dengan bantuan ilustrasi berupa gambar murid yang sedang melaksanakan musyawarah. Kemudian menghubungkan musyawarah tersebut dalam kehidupan di lingkungan murid.

Isi: Menguraikan makna demokrasi secara umum, perilaku dan sikap demokrasi secara umum. Kemudian menunjukkan artikel terkait tingkat penerapan demokrasi di Indonesia yang

berada pada level golongan lemah berdasarkan Economist Intelligence Unit (EIU). Berdasarkan hal tersebut dijelaskan perilaku dan sikap warga negara yang perlu dikembangkan seperti kebebasan berpendapat dan berpikir kritis. Hal ini akan mendorong kuatnya demokrasi dari segi persamaan di mata hukum, partisipasi dalam kebijakan, distribusi yang adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Penutup: Menguraikan terkait dengan prinsip-prinsip demokratis dalam menjalankan perilaku demokratis yaitu di antaranya Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan kecerdasan, Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Demokrasi dengan rule of law, Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, Demokrasi dengan hak asasi manusia, Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, Demokrasi dengan otonomi daerah, Demokrasi dengan kemakmuran, Demokrasi yang berkeadilan sosial. Bagian ini juga mengingatkan agar murid pada era perkembangan teknologi saat ini sikap dan perilaku demokrasi mampu dimanfaatkan sebaik mungkin.

Makna: Penekanan pada pentingnya perilaku dan sikap demokrasi yang harus dikembangkan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila, utamanya pada era keterbukaan informasi saat ini. Ditunjukkannya artikel terkait dengan tingkat demokrasi Indonesia yang lemah berdasarkan organisasi EIU dapat menjadi penyadaran bahwa saat ini demokrasi di Indonesia memiliki banyak permasalahan mulai dari penegakan hukum, pengambilan kebijakan, kebebasan berpendapat dan distribusi keadilan (halaman 54-64 buku kelas 11).

Topik: Memahami makna demokrasi secara umum dan dalam konteks Indonesia melalui pemilihan umum bagi pemilih pemula.

Pendahuluan: Mendeskripsikan makna dalam sila ke empat Pancasila yang digambarkan dengan lambang kepala banteng sebagai suatu konsep demokrasi yang dijalankan di Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Dan deskripsi terkait proses demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Isi: Menguraikan pengertian demokrasi secara umum dan secara khusus dalam konteks pemerintahan Indonesia dengan prinsip kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila sehingga disebut "Demokrasi Pancasila". Selanjutnya menguraikan terkait pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sebagai kegiatan demokrasi untuk memberikan hak suara dalam menentukan suatu pemimpin baik itu di tingkat lokal sampai tingkat nasional. Hal tersebut merupakan perwujudan dari amanat aturan perundang-undangan baik prosesnya maupun tujuannya. Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL). Syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya uraian tentang pemilih pemula sebagai bagian bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi sebagai salah satu tolak ukur tingkat demokrasi di Indonesia. Yang dimaksud pemilih pemula yaitu mereka yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan hak suara dalam Pemilu. Diuraikan juga dalam bagian ini tata cara pemilihan umum dan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penutup: Menguraikan pentingnya pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu yaitu untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi, literasi politik, idealisme dan kesinambungan generasi bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi dengan berbagai cara seperti cerdas memanfaatkan media, meningkatkan kesadaran politik, dan ikut keorganisasian baik dalam suatu lembaga maupun dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berpegang pada landasan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pandangan hidup bangsa.



Makna: Penekanan pada pentingnya para anak muda utamanya pemilih pemula untuk memahami Demokrasi Pancasila dan menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Sebagai perwujudan penegakkan Demokrasi Pancasila sesuai dengan nilai dalam sila ke empat Pancasila sehingga kedaulatan rakyat yang diamanatkan undang-undang dapat diwujudkan (halaman 194-210 buku kelas 12).

### **Struktur Teks Pendidikan Politik dalam Buku Murid Pendidikan Pancasila pada Kajian Kebijakan Politik**

Topik: Gotong royong dalam membangun ekonomi Pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui berdikari dalam perekonomian.

Pendahuluan: Menegaskan kembali nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara sehingga dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan politik sesuai dengan paradigma Pancasila. Tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Isi: Menguraikan penjelasan terkait dengan sistem ekonomi secara umum dan menguraikan arti sistem ekonomi Pancasila beserta prinsip-prinsip dan caranya, sebagai bagian dari pembangunan negara melalui gotong royong oleh partisipasi masyarakat dan kebijakan anggaran. Dijelaskan juga berdikari ekonomi bagian dari partisipasi warga untuk menyesuaikan mengkonsumsi sesuai kebutuhan dan ajakan untuk menghidupkan kembali sistem koperasi.

Penutup: Bagian ini menjelaskan revitalisasi kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi ekonomi sesuai pasal 33 UUD NRI 1945. Dan penerapan gotong royong yang harus dilakukan oleh warga negara melalui sistem ekonomi Pancasila.

Makna: Penekanan dalam halaman ini mengindikasikan bahwa seluruh kebijakan politik dan ekonomi dalam pembangunan nasional harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila harus sesuai dengan pasal 33 UUD NRI 1945 berdasar atas asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan berdasarkan prinsip moral ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditekankan juga contoh penerapannya yaitu adanya koperasi, alokasi yang sesuai dari Badan usaha, pemberian gaji dan jaminan yang sesuai, negara menguasai produksi yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, pembentukan UMKM yang dilindungi oleh pemerintah, pemerataan kesempatan kerja dan jaminan sosial, dan menciptakan akses dalam mendapat modal dan regulasi yang mudah (halaman 136-144 buku kelas 10)

Topik: Pedoman dalam pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara

Pendahuluan: Mendeskripsikan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Isi: Menguraikan partisipasi warga negara berkewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan, kebijakan politik pertahanan dan keamanan sesuai pedoman kekuatan rakyat dalam rangka menciptakan keamanan nasional dan perdamaian dunia, dilaksanakan oleh tentara nasional Indonesia sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pertahanan dan keamanan di mulai dari wilayah administrasi bawah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penutup: Penerapan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada capaian tujuan keamanan nasional dan terciptanya perdamaian dunia.

Makna: Penekanan terdapat pada pedoman dalam pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara yang harus sesuai dengan kebijakan politik nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Mendorong kewajiban menjaga keamanan dan pertahanan nasional oleh seluruh rakyat berdasarkan artikel berita yang ditampilkan dan capaian pemerintah dalam penambahan Alutsista (halaman 195-197 buku kelas 10).

Topik: Peran Indonesia dalam organisasi Internasional.

Pendahuluan: Mendeskripsikan asal usul organisasi Internasional yang di masuki oleh Indonesia (halaman 203-204 buku kelas 10).

Isi: Mendeskripsikan Posisi dan peran Indonesia dalam setiap organisasi internasional yang dimasuki diantaranya, PBB, ASEAN, OPEC, dan OKI

Penutup: Bagian ini menjelaskan tujuan masing-masing organisasi yang diikuti oleh Indonesia.

Makna: Penekanan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam setiap organisasi yang dimasukinya seperti di PBB Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan, beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang terbaru ialah periode 2019–2020, dan terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB pada tahun 2020–2022. Di ASEAN Indonesia sebagai Ketua begitupun di OPEC.

Topik: Arah kebijakan pemerataan dan pembangunan infrastruktur pemerintah yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendahuluan: Mendeskripsikan nilai sila ke dua Pancasila sebagai prinsip utama dalam menentukan suatu produk kebijakan pembangunan negara Indonesia dengan pertimbangan harkat dan martabat manusia.

Isi: Menguraikan implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal pembayaran pajak mencakup pembayaran iuran sekolah maupun kuliah. Selain pertimbangan berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, juga diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memenuhi prasarana desa, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim termasuk kenaikan air laut.

Penutup: Menegaskan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pengaturan alokasi APBN oleh lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan daerah.

Makna: Penekanan bahwa dasar pemerataan pembangunan negara Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan prinsip sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (halaman 86-87 buku kelas 12).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis struktur teks yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam buku murid Pendidikan Pancasila tingkat sekolah menengah atas yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa struktur konten pendidikan politik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada kurikulum merdeka menunjukkan materi pendidikan politik dominan pada penekanan ideologi Pancasila. Pendidikan politik tersebut mendorong individu agar dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik, yaitu nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Integrasi Pancasila dalam pendidikan politik dianggap penting agar siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan politik. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa mata pelajaran ideologi dan politik perlu bersinggungan dengan pendidikan integritas dan berkisar pada identifikasi konten inti. Berdasarkan struktur mikro dapat ditemukan bahwa pada intinya, segala permasalahan terkait politik di Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan langkah ideal dalam mengatasinya. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila untuk masa depan tidak hanya pendidikan tentang Pancasila, tetapi juga pendidikan melalui Pancasila dan pendidikan untuk Pancasila.

Selanjutnya terdapat kajian pendidikan politik yang tidak berimbang. Hal ini dapat ditemukan pada uraian struktur teks yang memperlihatkan ketimpangan isi kajian tema terkait pendidikan politik dalam buku murid. Secara keseluruhan, kajian demokrasi dan kebijakan politik sangat kurang, sementara kajian terkait sistem politik sedikit lebih dominan. Prinsip dasar demokrasi yang memberikan pengetahuan dan penanaman nilai-nilai demokrasi perlu

peningkatan kuantitas materi karena hal tersebut memberikan pemahaman dan kesadaran terkait nilai kebebasan, tanggung jawab, kemandirian, hak untuk menentukan diri sendiri, partisipasi, toleransi, pluralisme, kemajuan, serta perdamaian. Kemudian terkait dengan penjelasan dalam wacana pendidikan politik, terdapat penggunaan pendekatan kesetiaan dan ancaman dalam menyampaikan pesan. Pendidikan politik dengan menggunakan pendekatan kesetiaan cenderung mempromosikan identitas nasional yang bersatu, terutama di tengah keragaman, dan memandang pendidikan politik sebagai hal penting untuk membangun komitmen nasional. Dengan demikian, pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila perlu pengembangan yang signifikan melalui materi-materi yang relevan dan konstruktif bagi siswa. Pengembangan ini bukan hanya sekadar untuk memperluas pengetahuan mereka, tetapi juga untuk menyiapkan mereka agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan demokrasi yang sehat di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, N. (2016). Explaining Political Knowledge : The Role of Procedural Quality in an Informed Citizenry. *Political Studies Association*, 65(1), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0032321716632258>
- Curaming, R. A. (2020). Power and knowledge in southeast asia. In *Power and Knowledge in Southeast Asia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429438196>
- Dandan, L., Noordin, N. bt, Ismail, L., & Wenling, L. (2023). An exploration on integration of “curriculum ideological and political education” into senior high school english course. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(7), 1454–1468. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17206>
- Gong, Y., Wu, X., Ma, C., & Guo, J. (2023). The advantages of ideological and political education of middle school physics and the matters needing attention in its implementation. *International Journal of Education and Humanities*, 6(3), 123–125. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v6i3.4761>
- Handam, & Tahir, M. M. (2020). Political education for high school students in makassar city. *Journal La Edusci*, 01(01), 1–6. <https://doi.org/10.37899/journallaedusci.v1i5.256>
- Hefner, R. W., & Bagir, Z. A. (2021). *Indonesian pluralities: islam, citizenship, and democracy*. University of Notre Dame Pres.
- Himawan, N. A., & Wilujeng, I. (2020). Improving students’ problem-solving skills through quick on the draw model assisted by the optical learning book integrated the Pancasila. *Journal of Physics: Conference Series*, 1440, 1–5. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1440/1/012031>
- Howe, B. (2022). *Society and democracy in South Korea and Indonesia*.
- Lestari, D. I., Kurnia, H., Fatmawati, F., & Fauziah, R. S. (2024). Membentuk karakter unggul melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.61476/gqm6av11>
- Nasiwan. (2023). *Pendidikan politik transformatif: kado satu abad kemerdekaan Indonesia*. UNY Press.
- Patriansyah, W., Hasibuan, N., Hasibuan, M., & Juniasih, T. E. (2024). Analisis peran pendidikan politik dalam membangun kesadaran mahasiswa berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 40–49. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.56>
- Pattiruhu, F. J. (2022). Hakekat Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Milenial. *SOSHUMDIK*, 1(3), 45–55. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.127>
- Purdey, J., Missbach, A., & McRae, and D. (2020). *Indonesia state and society in transition*.

- Puspita, A. M. I., Al Ghony, A. E., Paramita, M. R., Albahri, N. M., Ayu, M. N., & Gumilar, G. P. D. (2024). Optimalisasi peran pendidikan pancasila dalam menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 146–155. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3216>
- Schneier, E. (2016). *Muslim democracy Politics, religion and society in Indonesia, Turkey and the islamic world*. Routledge.
- Shadiqi, M. A., Ernawati, G., Hariati, R., Arasy, K. F. hasan, I'anah, N., Istiqomah, W. Al, Firman, U. N., & Erlyani, N. (2022). Educational intervention program for young voters: improving political knowledge and voting behavior in the 2020 simultaneous local elections. *Jurnal Politik*, 8(1), 92–116. <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.1061>
- Sujastika, I., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2024). Peranan Sosial Media Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 704–712.
- Supriyadi, Masrukhi, Astuti, T. M. P., & Triatmaja, H. (2020). Habituation of political learning in senior high schools in yogyakarta city. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 443(ISET 2019), 197–200. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200620.038>
- Suryadinata, L. (2018). Pancasila and the challenge of political islam : past and present. *ISEAS Yusof Ishak Institut*, 14, 1–20. <https://doi.org/10.1355/9789814376440-014>
- Sutopo, S., Nuryanto, A., Sugiyono, S., & Paryanto, P. (2020). Pancasila ethics and culture-based education model for vocational high school. *Journal of Physics: Conference Series*, 1446(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1446/1/012055>
- Vandijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (Second, pp. 466–485). Wiley Blackwell.
- Wang, L., & Tian, J. (2023). Research on the integration of new era junior high school ideological and political education with integrity education. *Curriculum and Teaching Methodology*, 6(21), 78–84. <https://doi.org/10.23977/curtm.2023.062113>
- Zhang, R. (2024). Study on junior high school english reading teaching based on the ideological and political education. *International Journal of Education and Humanities*, 13(3), 87–90. <https://doi.org/10.54097/aa6cwj78>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).